

TAJUK RENCANA

Setelah Pilkada

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sudah berlangsung dengan lancar, aman, tanpa halangan dan kendala berarti. Meski saat ini masih dalam tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan sampai 16 Desember mendatang, namun masyarakat sudah mengetahui siapa pemenangnya dari hasil penghitungan sementara. Juga dari hasil *quick count* dari lembaga-lembaga survei yang selama ini tidak terpaut jauh dari hasil resmi penghitungan KPU.

Para pasangan calon (paslon) yang tampak unggul juga sudah banyak yang mendeklarasikan kemenangannya, pada Rabu (27/11), dan menyampaikannya secara resmi dalam konferensi pers yang dihadiri wartawan berbagai media, baik cetak, elektronika, maupun online, sehingga masyarakat luas mengetahuinya. Ucapan selamat atas kemenangan pun berdatangan. Sementara itu pasangan calon yang tidak beruntung, ada yang dengan elegan mendatangi yang menang untuk mengucapkan selamat. Ada juga yang masih menunggu hasil penghitungan resmi KPU.

Pada dasarnya, menang kalah dalam suatu kontestasi adalah biasa. Dalam suatu pemilihan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak ada yang menang semua atau kalah semua. Karena itu kondisi apapun yang terjadi, kalau berani maju dalam kontestasi mestinya harus siap menghadapinya. Dengan begitu, kalau nasibnya tidak beruntung, misalnya, tidak menjadi *mutung*. Begitu juga yang beruntung, tidak lantas *kumalungkung*.

Karena itu, bagi yang menang, termasuk para pendukungnya, jangan berlebihan dalam bereforian. Apalagi amanah dan tugas berat sudah di depan mata. Semua janji dan rencananya yang diumbar selama masa kampanye juga harus ditepati. Rakyat sudah mencatat semua itu, apalagi yang terekam dalam video, misalnya saat Debat Pilkada, sewaktu-waktu bisa dibuka kembali. Selain di akhir masa jabatan, di akhirat kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban.

bannya.

Yang tidak kalah penting, bagi yang akhirnya terpilih menjadi kepala daerah, pada dasarnya ia tidak hanya menjadi pemimpin bagi yang memilih atau mendukungnya saja, melainkan menjadi pemimpin seluruh rakyat yang ada di wilayahnya, termasuk yang tidak memilih bahkan mungkin memusuhinya. Karena itu sebagai pemimpin harus bisa bersikap adil dan bijaksana. Rakyat jangan sampai dibeda-bedakan atau ada yang dianaktirikan. Semua harus dilayani dengan baik. Sebagai pemimpin harus terus berbuat baik kepada rakyatnya, apakah lima tahun mendatang masih bisa maju lagi dalam Pilkada maupun tidak.

Sedang bagi yang kalah, kalau kecewa pasti bisa dimaklumi. Sebab selama ini sudah berupaya keras untuk menarik simpati masyarakat. Hanya saja, kekecewaan tersebut jangan sampai berlarut. Melainkan harus segera bangkit lagi untuk ikut serta membangun negeri ini, misalnya dengan terus menebar kebaikan. Apalagi kalau masih mau maju dalam Pilkada lima tahun mendatang. Kalau pada Pilkada tahun ini kalah bisa jadi pada Pilkada mendatang akan menang. Kalau pun nanti tidak puas dengan hasil penghitungan KPU, bisa menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu masyarakat, yang mungkin selama ini berbeda pilihan dan dukungan, hendaknya kembali hidup *guyup rukun* dan berdampingan secara tenteram dan damai, sehingga bisa bekerja dan beraktivitas dengan normal. Perselisihan karena beda pilihan tidak perlu dilanjutkan karena tidak ada manfaat. Semua harus bersatu dan mendukung siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah.

Akhirnya diucapkan selamat kepada yang menang. Semoga bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, bisa menepati semua janjijannya, serta bisa memajukan daerah dan rakyatnya. Kalau semua ini bisa dilaksanakan, siapa tahu nanti yang bersangkutan masuk surga karena jabatannya. (*)-d

Zakat, Instrumen Wujudkan Umat Kuat dan Bermartabat

SECARA sosial-ekonomi, manusia terbagi dua; manusia yang memiliki kemampuan ekonomi dan manusia yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya sekalipun. Manusia kategori kedua inilah yang menjadi perhatian ajaran sosial Islam, melalui ibadah *maliyah* atau ibadah dengan harta.

Dalam Islam, ada beberapa ajaran yang mengandung nilai *isti'lanah ijtima'iyah al-maliyah*, (membantu sesama manusia dengan harta), antara lain wakaf, hibah, sedekah, infaq, kafarat, kurban, fai, ghanimah, dan tentu saja zakat. Meski zakat merupakan rukun Islam, namun sebenarnya nilainya kecil, karena hanya 2,5% saja yang dikeluarkan oleh *sohibul mal (muzakki)*. Sasarannya pun terbatas, hanya untuk mereka yang masuk dalam kelompok 8 (*asnaf tsamaniyah*).

Ibadah *maliyah* di Indonesia memiliki potensi sangat besar dan menjadi kekuatan ekonomi alternatif di luar pendapatan negara. Realisasi ibadah *maliyah* dari zakat dan lainnya, sampai menjelang akhir 2024 tercatat hampir mencapai Rp 41 T. Angka ini baru yang diperoleh melalui lembaga yang tercatat, seperti BAZNAS dan LAZ. Boleh jadi, yang tidak tercatat justru lebih besar, karena praktik keder-mawanan masyarakat Indonesia yang tinggi.

Uang sebesar itu, telah memberi kontribusi pada penyelesaian beberapa masalah sosial, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Melalui instrumen zakat dan ibadah *maliyah* lainnya, banyak orang miskin terbantu kebutuhannya, pendidikan, dan kesehatannya, sehingga membuatnya lebih sehat dan kuat.

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat sukses dan zakat menjadi instrumen sosial utama dalam pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat. Pada masa Abu Bakar, zakat dikelola oleh lembaga yang disebut *ëamil zakat*. Lembaga ini mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke seluruh penjuru negeri Arab. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul ëAziz, zakat telah dikelola secara profesional dan sesuai undang-undang yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam. Saat itu lembaga zakat telah mampu mengelola zakat untuk pemberdayaan umat, pemantik kemandirian ekonomi dan penopang kemampuan usaha produktif, sehingga

Waryono Abdul Ghafur

saat itu tidak dijumpai masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat secara merata dapat merasakan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan.

Jadi, zakat dan ibadah *maliyah* mampu berperan signifikan dalam pemberdayaan umat. Karena itu penulis mengajak semua Islam untuk meningkat-taikan kualitas dan kuantitas ibadah



maliyah, seperti zakat secara terorganisir dan melalui lembaga negara dan yang mendapat izin negara. Penunaian ibadah *maliyah* merupakan bukti nyata konsistensi dan linieritas iman seseorang, yakni iman yang tersembunyi dalam hati, kemudian dideklarasikan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan keder-mawanan. Itulah mengapa, ibadah *maliyah* secara general disebut sedekah, yang satu akar kata dengan *as-sidq* yang berarti benar antonim *al-kidzb* (yang berarti bohong atau berdusta). Karenanya orang yang tidak menjalankan ibadah *maliyah* disebut pendusta agama.

Zakat dan ibadah *maliyah* dengan peran dan kontribusi sebagaimana dikemukakan, tentu bila ditunaikan dengan prosedur benar dan tepat. Zakat dikatakan benar dan tepat jika memenuhi rambu-rambu sebagai berikut: Pertama, zakat ditunaikan dengan niat ibadah, bukan pamer status sosial dan kekayaan. Kedua, zakat dikeluarkan sebagai kesadaran untuk *tazkiyah nafs dan tazkiyah mal*, yakni sarana untuk pembersihan dan penyucian jiwa dari segala sifat kikir, pelit dan bakhil, juga

sarana pembersihan dan penyucian harta dari segala *syubhat* dan keharaman. Dermawan atau *muzakki* sadar bahwa harta yang ia peroleh, meski dengan usaha halal, namun tidak menutup kemungkinan ada unsur *syubhat*, sehingga tetap harus dibersihkan. Ia juga sadar, harta yang diperoleh, apalagi dengan keringat bercucuran, dapat menggodanya untuk sulit memberikan kepada orang lain meski hanya sebagian.

Ketiga, zakat adalah *masalahah*. Artinya, zakat harus dikelola dengan tepat sehingga berdampak pada kemaslahatan yang banyak bagi umat. Zakat harus dikelola dengan manajemen profesional dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya.

Dengan tiga tuntunan di atas, zakat akan melahirkan *ukhuwwah* yang *qowiyyah*. Zakat akan menumbuhkan *ukhuwwah* yang kokoh di antara sesama umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*) dan sesama umat manusia (*ukhuwah Insaniyyah*). Dengan zakat, umat yang berkemampuan membantu umat lain yang lemah, sehingga yang lemah bukan sekadar akan dapat hidup dengan layak, namun boleh jadi akan tumbuh menjadi umat yang

kuat. Hal ini karena -melalui ibadah *maliyah* seperti zakat, disamping kebutuhan dasarnya terpenuhi juga dapat didorong untuk lebih berdaya, sehingga membuatnya kuat secara ruhani, psikologis, intelektual, fisik, dan ekonomi. Umat yang kuat inilah yang lebih baik dan lebih dicintai Allah Swt dari pada umat yang lemah. (*)-d

*)Prof Dr KH Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PHK Massal, Kemiskinan dan Gejolak Sosial

PHK massal terjadi di berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk di sektor tekstil, alas kaki, manufaktur, dan jasa. Matahari Department Store telah menutup 7 gerai dan melakukan PHK ratusan karyawan hingga kuartal III/2024. Volkswagen berencana melakukan PHK massal, menutup pabrik, dan memotong gaji karyawan. PT Primmissima mengalami krisis keuangan dan melakukan PHK massal. PHK banyak terjadi di Jakarta, terutama di sektor jasa seperti restoran dan kafe.

PHK massal menjadi pintu gerbang kemiskinan. Dan kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi lainnya di dalam masyarakat. Sehingga kemiskinan yang massif, merata dan terstruktur membuka pintu-pintu keretakan dan gejolak sosial di masyarakat. Apabila sudah terlanjur masuk ke gejolak sosial, lebih berat rasanya mengurai permasalahan sosial secara kondusif dan terstruktur. Risikonya adalah mempertaruhkan masa depan bangsa ini dalam titik yang sangat berbahaya.

Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat seperti standar pangan, gizi, kesehatan, pendidikan, sandang dan papan. Dalam berbagai pandangan ada tiga jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh satu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedang kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapat-

Hanan Wihasto

annya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (*basic needs*).

Di belahan negara-negara di dunia ini masalah kemiskinan adalah *diferensial* dari istilah *under developed* dan *iDeveloping-economies*, sebutan dari negara yang belum maju ekonominya dan rendah pendapatannya. Bertitik tolak dari itulah kiranya zaman memerlukan pengembangan ekonomi yang lebih hakiki dan fokus ke pengentasan kemiskinan. Karena itu ekonomi beralih dari masalah efisiensi menuju masalah mobilisasi sumber alam untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif. Pendek kata, pemerataan menjadi isu besar untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, sehingga perlu dibuat langkah-langkah riil dalam mengimplementasikan pemerataan, yaitu; pertama, pengalihan sumber alam (*resource reallocation*) disertai usaha penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya; kedua, kesempatan memperoleh asset atau modal bagi yang miskin melalui program jaminan pengaman sosial (JPS) yang produktif; ketiga, usaha pendidikan untuk meningkatkan kemampuan, etos kerja dan membuang sikap pasrah terhadap kemiskinan; dan keempat, pembangunan komunitas masyarakat yang mencakup kebutuhan primer dan vital yaitu; perbaikan gizi, kesehatan, sandang, perumahan, air minum, dan lain-lain, sehingga bisa mengangkat kelompok penduduk miskin ini menuju perikehidupan yang lebih manusiawi.

Bila dirunut tulisan di awal, tampaknya PHK adalah pintu masuk dan akar dari timbulnya kemiskinan dan gejolak sosial. Lalu bagaimana solusi atas PHK mas-

sal? Tentunya antara lain ; Pertama, mendorong investasi di sektor-sektor yang masih bertumbuh, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan industri kreatif. Kedua, mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap perubahan ekonomi global. Ketiga, perusahaan dapat mencari alternatif lain sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, seperti menempatkan karyawan di departemen atau posisi lain yang membutuhkan tenaga kerja. Keempat, pemerintah dapat merevisi peraturan impor untuk memberikan perlindungan produk-produk dalam negeri. Kelima, pemerintah dapat memberi jaminan stabilitas harga sehingga terjangkau oleh masyarakat. Keenam, pemerintah dapat menyelenggarakan program padat karya yang melibatkan masyarakat menengah ke bawah secara terstruktur dan sistematis. (*)-d

*)Hanan Wihasto SE MM, Dosen Tetap IBS STEI Yogyakarta, Dekan FE UCY 2019-2023, dan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional AFEBSI 2022-2026 (Ketua Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi).

Pojok KR

Sultan berharap pemimpin terpilih amanah. - Sama dengan harapan kita semua.

Di Semarang, polisi tembak siswa SMK. - Lagi-lagi penyalahgunaan senjata api.

Pemda awasi 4 SPBU yang curang. - SPBU lainnya tidak boleh meniru!

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.
Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkryk23@yahoo.com, iklanlkryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.